

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ancaman serius demokrasi Indonesia dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini adalah semakin maraknya instrumentasi kekerasan. Fenomena geng motor, tawuran warga antar kampung, kerusuhan suporter sepak bola, tawuran pelajar, dan berbagai kekerasan lainnya merupakan sedikit contoh dikedepankannya cara-cara kekerasan oleh warga masyarakat dibandingkan cara-cara damai penyelesaian masalah.

Kekerasan telah banyak terjadi berbagai daerah di Indonesia, dengan berbagai faktor pemicu; dari sederhana hingga kompleks; dari hanya karena kecewa kalah dalam suatu pertandingan persahabatan sepakbola hingga perbedaan agama dan keyakinan. Dalam jangka pendek, menengah, dan panjang fenomena kekerasan akan menghancurkan tatanan demokratis yang kita bangun (*destructing democracy*), merusak pembangunan karakter bangsa (*nation character building*) dan membahayakan keamanan dan integrasi nasional, sebab dalam suasana *chaos* dimungkinkan munculnya kepentingan pemangsa (*predatory interest*) dari luar.

Maraknya kekerasan ini menyulut munculnya konseptualisasi dan penggunaan istilah kekerasan sebagai budaya. Konsep dan istilah kekerasan sebagai budaya ini hanyalah implikasi dari semakin luas, mendalam, dan semakin kompleksnya jenis, jumlah, dan kualitas kekerasan yang dianggap bersifat sistematis (diorganisasi), fundamental dan berwatak menular. Berbagai instrumen, metode, dan justifikasi dicari untuk melegitimasi tindak kekerasan,

seperti legitimasi agama dalam banyak kasus dan bahkan otoritas negara, misalnya tentara dan polisi dalam berbagai kasus kekerasan. Ada banyak paradoks dimana kekerasan di satu sisi dicela, tapi di sisi lain juga dipuja (Mudji Sutrisno, 1998). Paradoks lain, kekerasan juga diinstrumentasi oleh lembaga pendidikan (Abd Rahman Assegaf, dkk., 2008) yang mestinya beroperasi sebaliknya.

Kekerasan merupakan watak barbarian. Sebagai watak, kekerasan pasti bukan produk instan. Kekerasan fisik brutal merupakan gabungan dari berbagai irisan kekerasan: simbolik, verbal, *bullying*, ancaman, intimidasi, dan semacamnya. Pendidikan patut diduga merupakan bagian dari pranata yang belum berhasil menanamkan karakter anti kekerasan. Di sisi lain, pendidikan juga merupakan variabel penting untuk melakukan intervensi dan rekayasa sosial. Oleh karena itu melalui lembaga pendidikan diperlukan upaya pencegahan instrumentasi dan institusionalisasi kekerasan dalam masyarakat melalui pembelajaran yang berorientasi pada upaya membangun kedamaian (*peacebuilding*) dan menerapkan prinsip-prinsip anti kekerasan.

Urgensi penelitian ini terletak pada dua konteks. Konteks pertama, konteks makro dimana kekerasan di Indonesia sudah hadir sebagai fenomena kultural. Carok di Madura, Sirri' di Bugis, dan beberapa fragmen tentang pecalang di tengah-tengah adat Bali merupakan contoh yang dapat dikemukakan.

Lebih dari itu, kekerasan belakangan ini muncul sebagai fenomena harian yang dengan sangat mudah ditemui dan diberitakan oleh media massa di era keterbukaan ini. Kekerasan menjadi instrumen instan yang seringkali digunakan oleh sebagian masyarakat dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Tragedi

Poso, Ambon, Sambas, Sampit, atau yang baru lalu di Cikeusik, Temanggung, dan sebagainya merupakan sekian contoh yang dapat dengan mudah kita ungkap. Berulangnya kekerasan di tengah masyarakat kemudian mendorong untuk secara salah kaprah kekerasan disebut sebagai budaya, meskipun mestinya budaya merupakan produk adiluhung peradaban manusia, bukan aktivitas yang destruktif, merusak dan menyakiti.

Selain konteks makro tersebut, penelitian ini dapat ditempatkan dalam konteks mikro dimana fenomena kekerasan dapat dengan mudah kita temui dalam praktek pembelajaran, paling tidak dari berbagai pemberitaan yang diungkap oleh media massa. Beberapa bentuk kekerasan disinyalir berlangsung dalam lingkungan pendidikan, mulai dari level yang sederhana seperti kekerasan antar siswa hingga yang tidak mudah dilogikakan, seperti kekerasan fisik oleh guru atas muridnya. Pemberitaan mengenai perkelahian, tawuran siswa antar sekolah, kekerasan fisik oleh guru atau kekerasan simbolik yang bahkan membuat siswa nekat melakukan tindakan bunuh diri dapat dengan mudah kita baca dan saksikan dalam pemberitaan media.

Berbagai kekerasan yang terjadi tersebut merupakan sekelumit penanda bahwa atmosfer sekolah yang idealnya merupakan proses pembudayaan (*civilizing*) dan pemanusiaan (*humanizing*) belumlah ideal. Bahkan berbagai kekerasan oleh anak muda dapatlah dikatakan merupakan bukti tidak mulusnya peran lembaga pendidikan sebagai media untuk menciptakan masyarakat (*civilized*) yang beradab dan berorientasi pada kedamaian (*peace*) dan

menanggalkan instrumen kekerasan dalam berbagai relasi kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah sistemik untuk mencegah fenomena maraknya instrumentasi kemasyarakatan. Tempat dan proses yang dapat kita harapkan melakukan peran tersebut adalah lembaga pendidikan. Karenanya pendidikan harus steril dalam dirinya anasir kekerasan, mulai dari kekerasan simbolik hingga kekerasan fisik. Lalu lebih dari itu pendidikan itu juga mestinya melakukan langkah pelebagaan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang berorientasi pada kedamaian dan menerapkan prinsip-prinsip nir dan anti kekerasan.

Dalam konteks demikianlah, penelitian ini urgen untuk dilaksanakan. Di satu sisi untuk mengidentifikasi praktek-praktek kekerasan dalam pembelajaran, dari kekerasan fisik hingga kekerasan simbolik, serta di sisi lain penerapan prinsip-prinsip anti kekerasan dan orientasi pada kedamaian dalam praktek pembelajaran di sekolah. Lalu temuan awal tentang plus minus praktek pendidikan di sekolah dijadikan dasar untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) orientasi kedamaian dan anti kekerasan dalam pembelajaran melalui proses yang terstruktur dalam pembelajaran. Langkah ini diharapkan akan menjadi alternatif metode yang secara sistemik dapat dilakukan untuk mencegah instrumentasi kekerasan dalam masyarakat yang tidak saja mengganggu integrasi dan harmoni sosial namun lebih dari itu membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Tujuan

Penelitian ini memiliki tiga tujuan khusus: *Pertama*, menganalisis akar, anatomi, dan pola kekerasan simbolik, verbal, psikis dan fisik dalam praktek pembelajaran. Penelitian ini akan mengeksplorasi hal-hal tersebut sehingga dapat menjadi basis bagi penyusunan pembelajaran bebas kekerasan.

Kedua, menganalisis prinsip-prinsip anti kekerasan dalam pembelajaran. Di samping mengungkap aspek-aspek kekerasan, penelitian ini juga akan mengidentifikasi prinsip-prinsip anti kekerasan dalam praktek pembelajaran. Konstruksi prinsip-prinsip tersebut dalam pembelajaran tersebut merupakan salah satu dasar dalam pencapaian tujuan khusus selanjutnya.

Ketiga, mengembangkan Model *Peace-building Teaching and Learning*. Pada akhirnya, melalui penelitian ini akan dikonstruksi model pembelajaran alternatif untuk mencegah membudayanya kekerasan di tengah-tengah generasi masa depan Indonesia.

C. Manfaat dan Luaran Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua: Manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis penelitian dapat diuraikan sebagaimana berikut:

1. Memperkuat khazanah literer tentang kekerasan sekaligus potensi kedamaian dalam lembaga pendidikan. Harus diakui tidak banyak

literatur yang mengungkap hal tersebut secara ilmiah dan sistematis, selain yang secara parsial banyak diungkap oleh media massa.

2. Setelah penelitian ini dapat diteorisasi pola-pola kekerasan berbasis pendidikan yang banyak berlangsung di Indonesia, untuk kemudian juga dikonseptualisasi dan diteorisasi pola-pola kontra kekerasan berbasis pendidikan.

Manfaat praktis penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menghasilkan rumusan hasil analisis dan eksplorasi mengenai pola-pola kekerasan dalam pembelajaran sehingga dapat dijadikan bahan untuk diformulasikan dalam bentuk kebijakan oleh Departemen Pendidikan Nasional untuk penyelesaian masalah kekerasan dalam pendidikan.
2. Menghasilkan kertas kerja, artikel jurnal, dan petunjuk praktis pelaksanaan Model *Peace-building Teaching and Learning* untuk dijadikan rujukan dalam mengarusutamakan peran lembaga pendidikan sebagai garda terdepan pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang damai (*peaceful*) dan beradab (*civilized*). Ini merupakan luaran pada tahun pertama. Luaran tahun kedua adalah *pilot project* Model *Peace-building Teaching and Learning* dan buku tentang hasil *pilot project* tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pola Kekerasan dan Kekerasan dalam Pendidikan

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan konsep “kekerasan” adalah apa yang diterjemahkan dari bahasa Inggris *violence*. “Violence” berasal dari kata Latin “vis” (daya kekuatan) dan “latus” (yang berasal dari *ferre*, membawa). Arti gabungan dua kata tersebut adalah: membawa kekuatan (Newton Garver, 1976: 349).

Kekerasan menurut Poerwadarminta, secara etimologis berarti ‘sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan’. Sedangkan “paksaan” berarti tekanan, desakan yang keras. Jadi, kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan. Dalam *New Oxford Dictionary* kekerasan berarti: *behavior involving physical force intended to hurt, damage, or kill someone or something* (Arinto Nurcahyono, tanpa tahun: 3-4).

Secara lebih rinci dinyatakan oleh Robert Audi (1941-) bahwa kekerasan merupakan serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang; atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang (James A. Gould, John J. Iorio, 1971: 62).

Menurut Jack D. Douglas dan Frances Chalut Waksler, istilah kekerasan (*violence*) digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik secara terbuka (*overt*) maupun tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) maupun

bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain (Abd. Rahman Assegaf, dkk, 2008).

Cara pandang berbagai ahli mengenai konflik beraneka ragam, tergantung latar keilmuan dan pengalamannya. Sorel misalnya menempatkan kekerasan dari berbagai dimensi, dari dimensi psikologis hingga dimensi etik dan politis (Jeremy Jennings, 1999). Pemikir seperti Thomas Hobbes yang salah satu teorema terkenalnya *homo homini lupus omnium contra omnes* menyatakan bahwa sesungguhnya di dalam diri manusia terdapat watak asali (*state of nature*) berupa kekerasan. Hanya *Leviathan* (suatu pemerintahan negara yang menggunakan kekerasan terpusat dan memiliki kekuatanlah) yang dapat mengatasi keadaan tersebut (Frans Magnis Suseno, 2002: 200)

Namun di sisi lain dalam diri manusia sesungguhnya terdapat *nature* yang baik. Itulah yang sering ditegaskan oleh agamawan dan para pengkaji kejiwaan sebagai fitrah (natur baik). Karena itulah, di samping potensi berkonflik, sesungguhnya manusia juga memiliki potensi menciptakan kedamaian di muka bumi.

Kekerasan dan konflik berada dalam satu spectrum yang sama. Kekerasan dapat menjadi tahapan sangat lanjut dari konflik, tapi dapat juga kekerasan dipersamakan dengan konflik. Bagi Indonesia, sebagai negara multikultural, kajian mengenai konflik dan kekerasan senantiasa relevan.

Masyarakat multikultural mengandung potensi konflik. Konflik terjadi karena masyarakat tersebut mengandung berbagai kepentingan, lembaga, organisasi, dan kelas sosial yang tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dan

serasi. Konflik bisa disebabkan oleh banyak hal. Konflik dapat disebabkan oleh polarisasi sosial yang memisahkan masyarakat berdasarkan penggolongan-penggolongan tertentu dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan dan permusuhan antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang dapat berujung pada munculnya kekerasan yang terbuka.

Konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Terjadinya konflik juga tidak terelakkan dalam masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai struktur sosial yang mencakup proses-proses asosiatif dan disasosiatif yang hanya dapat dibedakan secara analisis. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa konflik merupakan pencerminan pertentangan kepentingan dan naluri untuk bermusuhan (Suharno, 2006: 1-4).

Menurut Galtung, terdapat 3 (tiga) unsur utama konflik: a) Ketidaksesuaian diantara kepentingan dan kontradiksi di antara kepentingan, atau secara akademis sering disebut “ketidaksesuaian antara nilai-nilai sosial dan struktur sosial.” b) Perilaku negatif dalam bentuk persepsi atau stereotip yang berkembang diantara pihak-pihak yang berkonflik. 3) Perilaku kekerasan dan ancaman yang diperlihatkan (Rozi Syaifuan,dkk. 2006: 29).

Yang nyata-nyata destruktif bagi harmoni sosial dan integrasi nasional, adalah perilaku kekerasan. Kekerasan lebih jauh bahkan merupakan tantangan terberat sistem demokrasi yang kita pakai. Dalam berbagai negara demokrasi, kekerasan merupakan momok paling serius (Franco Ferraresi, 1996: 1-3).

Untuk mengantisipasi merebaknya kekerasan di tengah tingginya faktor pemicu di Indonesia, terutama karena realitas masyarakat Indonesia yang plural-

multikultural dan juga berbagai watak negatif manusia Indonesia (Mochtar Lubis, 2001), lembaga pendidikan harus hadir di tengah-tengah iklim kekerasan dengan membawa berbagai alternatif solusi, baik di level preventif, kuratif, maupun preservatif. Paling tidak untuk memastikan bahwa kekerasan tidak menjadi instrumen utama konflik horizontal yang belakangan ini marak kita saksikan.

Namun demikian, berbagai literatur dan penelitian acapkali menyajikan potret anomali dunia pendidikan yang dalam banyak kesempatan hadir sebagai agen kekerasan. Clive Harber (2004) misalnya, dalam *Schooling as Violence: How Schools Harm Pupils and Societies*, menghadirkan fakta dan analisis bagi sekolah sesungguhnya kerap hadir sebagai bagian dari gurita kekerasan di dalam masyarakat. Potret yang dihadirkan Harber antara lain sekolah sebagai lembaga otoriter, sekolah sebagai momok menakutkan bagi siswa, dalam sekolah juga terjadi berbagai reproduksi kekerasan, dan bahkan di dalamnya juga sering terjadi pelecehan seksual.

Dalam konteks Indonesia, studi Abd. Rahman Assegaf, dkk (2002) mendedahkan potret kekerasan yang tidak jauh berbeda yang terjadi di dunia pendidikan. Beberapa indikator terjadinya kekerasan dalam lembaga pendidikan dipotretnya dengan baik. *Pertama*, kekerasan terbuka yakni kekerasan yang dapat dilihat atau diamati secara langsung, seperti perkelahian, tawuran, bentrokan massa, atau yang berkaitan dengan fisik.

Beberapa fakta yang dia kemukakan dalam penelitiannya adalah kasus pengeroyokan empat siswa SMKI terhadap temannya Suharyanyo (17 tahun),

siswa kelas tiga SMKI yang dianiaya hingga meninggal karena alasan dugaan penipuan order mendalang.

Kedua, kekerasan tertutup yakni kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti mengancam, intimidasi, atau simbol-simbol lain yang menyebabkan pihak-pihak tertentu merasa takut atau tertekan. Ancaman dianggap sebagai bentuk kekerasan, sebab orang hanya mempercayai kebenaran ancaman dan kemampuan pengancam mewujudkan ancamannya. Assegaf mengemukakan contoh kasus demonstrasi mahasiswa menolak SK Rektor UGM Yogyakarta tentang Biaya Operasional Pendidikan atau BOP dimana kedua belah pihak saling mengancam, sebagai missal dari jenis kekerasan ini. Di satu sisi, pihak UGM akan melakukan *sweeping* KTP para demonstiran, di pihak lain, mahasiswa mengancam akan melakukan demo besar-besaran.

Ketiga, kekerasan agresif (*offensive*) yakni kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti perampasan, pencurian, pemerkosaan atau bahkan pembunuhan. Indikator kekerasan ini sudah masuk *prilakukriminal*, di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi menurut hukum tertentu. Assegaf mengemukakan beberapa contoh, seperti kasus pembobolan di Universitas Jember, pencabulan terhadap siswa SD atau SLTP, atau penembakan guru SD hingga tewas.

Keempat, kekerasan defensif (*defensive*) yakni kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan, seperti barikade aparat untuk menahan aksi demo lainnya. Contoh yang disampaikan misalnya sengketa tanah warga dengan pihak sekolah,.

Dalam penelitian yang sama Assegaf menambahkan bahwa dari sisi tingkat (*level*) kekerasan, intensitas suatu kekerasan bisa meningkat dari kekerasan ringan atau *potensi* menjadi *kekerasan* tingkat sedang bahkan dapat berlanjut pada kekerasan tingkat berat, berupa tindak kriminal dalam pendidikan. Kekerasan berada dalam bentuk *potensi*, jika masih dalam karakter bersifat tertutup, berupa unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi, pelecehan nama baik seseorang, dan ancaman atau intimidasi. Namun jika berubah menjadi konflik terbuka, unjuk rasa berubah menjadi bentrok, ancaman berubah menjadi tindakan nyata, dan kekerasan defensif menjadi ofensif, maka fenomena tersebut dapat disebut sebagai *kekerasan*.

Ironisnya lagi, fenomena kekerasan dari siswa ke siswa lainnya (*bullying*) kerap direspons secara permisif oleh banyak kalangan, khususnya guru (Turmudi, 2009: 1). Padahal kekerasan demikian dapat berujung hingga pada hilangnya nyawa siswa.

Fenomena tersebut tentu tidak layak disematkan pada entitas bernama dunia pendidikan. Karena itu perlu diupayakan langkah sistematis bahkan sistemik untuk memastikan kekerasan tidak bermetamorfosis menjadi budaya. Di antara yang efektif adalah dengan menciptakan alternatif pembelajaran untuk memanusiakan subjek didik, membudayakan (sipilisasi) watak mereka, sehingga pada saatnya akan terbentuk masyarakat demokratis yang bersendikan kedamaian (*democratic and peace society*)

B. Pembelajaran Alternatif untuk Pemanusiaan

Revitalisasi pembelajaran di sekolah merupakan langkah yang tidak bisa ditunda. Berbagai tawaran alternatif pembelajaran belakangan mengemuka.

Misalnya dalam jargon pendidikan yang “memanusiakan manusia seutuhnya”, dengan beberapa konsep turunan. Seperti, pembelajaran humanis, *active learning*, *quantum learning*, *quantum teaching*, dan *the accelerated learning*. Semuanya bermuara pada misi “*humanizing of the classroom*”.

Misi *humanizing of the classroom* ini dilatarbelakangi oleh kondisi sekolah yang otoriter, tidak manusiawi, sehingga banyak mengakibatkan peningkatan angka bunuh diri di kalangan siswa. Kasus-kasus bunuh diri di kalangan siswa banyak terjadi di Amerika Serikat dan Jepang.

Misi *humanizing of the classroom* ini dicetuskan oleh John P. Miller yang memberikan perhatian ekstra pada “pendidikan afektif”. Pendidikan model ini bertumpu pada tiga hal: menyadari diri sebagai suatu proses pertumbuhan yang sedang dan akan terus berubah, mengenali konsep dan identitas diri, dan menyatupadukan kesadaran hati dan pikiran. Perubahan yang dilakukan tidak terbatas pada substansi materi saja, tetapi yang lebih penting pada aspek metodologis yang dipandang sangat manusiawi (Assegaf, 2002).

Sudah sejak lama sesungguhnya pemikir seperti John Dewey, Paulo Freire, dan Ki hajar Dewantara menekankan bahwa pembelajaran idealnya merupakan laboratorium masyarakat. Di dalamnya terdapat interaksi humanis antara manusia dengan manusia lainnya. Interaksi siswa-siswa atau siswa-guru harus didasarkan pada nilai-nilai baik manusia di tiga level potensi yang dimilikinya: kognitif, afektif, psikomotorik; cipta, rasa, dan karsa.

Dalam konteks pendidikan sebagai media intervensi untuk mewujudkan masyarakat demokratis yang bersendikan kedamaian (*education for democracy*

and peace), Clive Harber (2004; 136-145) merekomendasikan dua pendekatan utama; yaitu 1) pendekatan sistemik, berupa reformasi sistem pendidikan, 2) pendekatan individual, berupa perbaikan orang perorangan (*individuals*) dalam pendidikan, khususnya guru yang semestinya di-*upgrade* dengan penekanan tertentu dalam *teachers education*.

Dalam konteks penelitian ini Model *Peace-building Teaching and Learning* merupakan langkah sistemik khususnya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran oleh orang perorang yang terlibat dalam pendidikan (*individuals*) dengan menekankan perubahan pada domain pembelajaran. Model *Peace-building Teaching and Learning* (Pembelajaran Bangun Damai, dapat diakronimkan sebagai “PERMAI”) menekankan pada dua sendi utama pembelajaran, yaitu pembelajaran demokratis dan pembelajaran yang beorientasi kedamaian, dengan menstimulus aspek-aspek bajik peserta didik dan guru sebagai manusia.

C. Peta Jalan Penelitian

Penelitian ini dapat ditempatkan sebagai bagian dari penelitian-penelitian lain sebelumnya. Sehingga ke depan dapat dikonstruksi arah futuristik yang lebih sistematis. Beberapa penelitian sebelumnya yang dapat disajikan dalam *roadmap* ini antara lain:

- 1) *Politik Rekognisi dalam Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Konflik di dalam Masyarakat Multikultural*. Dr. Suharno, M.Si. Dalam penelitian ini diungkapkan bagaimana peran negara (terutama pemerintah daerah) dalam menyelesaikan konflik dengan derajat kekerasan yang akut. Melihat

kesimpulan penelitian ini, tampak betapa pentingnya posisi negara dalam menyelesaikan konflik, terutama dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia.

- 2) *Kondisi dan pemicu kekerasan dalam pendidikan*, Drs. Abd. Rachman Assegaf, M. Ag., dan kawan-kawan. Penelitian ini mengungkap fenomena umum kekerasan dalam pendidikan. Fokus kajian dan sumber data penelitian ini berupa pemberitaan media massa tentang kekerasan-kerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Karena itu hasil analisis dan pembahasan penelitian ini masih sangat umum dan tidak secara detil mencermati praktek pembelajaran di kelas-kelas.
- 3) *Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kalangan Siswa SMU Yogyakarta*, Ajat Sudrajat, M.Ag., dan kawan-kawan. Penelitian ini menganalisis adanya potensi kerukunan hidup antar umat beragama di dalam lingkungan pendidikan di sekolah-sekolah menengah umum di kota Yogyakarta.
- 4) *Kerukunan Umat Beragama Dalam Teks Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, Ajat Sudrajat, M.Ag., dan kawan-kawan. Penelitian ini mengungkap potensi kerukunan umat beragama dalam dunia pendidikan, terutama yang secara eksplisit dan implisit termuat dalam buku-buku teks Pendidikan Agama Islam khususnya di perguruan-perguruan tinggi umum (non IAIN, sekarang UIN).
- 5) *Membangun Kultur Akhlak Mulia di Kalangan Siswa Pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah di Indonesia*. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag., dan kawan-kawan. Penelitian yang didanai oleh skim Hibah Strategis nasional DP2M

Dikti tahun 2009 ini mengungkap berbagai praktek pembangunan kultur akhlak mulia di kalangan siswa SD dan SMP di berbagai sekolah di Indonesia. Dalam penelitian tersebut diungkap berbagai praktek serta potensi penerapan akhlak mulia, namun demikian juga dianalisis kelemahan dan kekurangan dalam penerapan kultur akhlak mulia di kalangan siswa SD dan SMP.

6) *Pembelajaran Humanis: Sebuah Alternatif Pembelajaran Memanusiakan Manusia*. Bahrudin. Penelitian yang diurnalkan ini menyajikan prinsip-prinsip pokok pembelajaran yang memanusiakan manusia. Prinsip bahkan teknik pembelajaran aktif dan kuantum banyak diungkap dalam penelitian ini melalui penelusuran literatur (studi literatur).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti (pengaju proposal penelitian ini) dan rekan-rekan peneliti lainnya dapat diposisikan sebagai *preliminary research/knowledge* untuk melakukan penelitian ini. Berbagai penelitian tersebut dan penelitian ini merupakan bahan penting untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai tempat penyemaian kehidupan masyarakat masa depan Indonesia yang mengarusutamakan (*mainstreaming*) pembangunan kedamaian (*peacebuilding*).

Setelah penelitian ini selesai, dapat disistematiskan penelitian lebih lanjut mengenai pengarusutamaan prinsip-prinsip kedamaian dan anti kekerasan dalam pendidikan di luar konteks pembelajaran di dalam kelas, namun konteks lainnya, misalnya lingkungan sekolah, pembangunan kultur yang kongruen antara sekolah dan keluarga, dan sebagainya. Sehingga ke depan dapat diinstitusionalisasi langkah-langkah sistemik untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai lembaga

pokok dalam mencegah budaya kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Setting Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil setting waktu 2 (dua) tahun. Tahun pertama dilaksanakan untuk tahun anggaran 2013, yaitu selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di beberapa tempat sesuai kedudukan subjek penelitian, yaitu di Medan, Pontianak, Makassar, Mataram, dan Yogyakarta.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan *research and development* (R&D). Penelitian dengan teknik pengumpulan data mendalam dan analisis data secara induktif dilakukan untuk menemukan informasi-informasi, preposisi-preposisi, dan bahan-bahan penting sesuai dengan tujuan penelitian. Hasilnya kemudian dijadikan bahan untuk mengembangkan model alternatif dalam pembelajaran yaitu Model *peace-building teaching and learning*. Model tersebut kemudian diujicobakan secara terbatas untuk kemudian dievaluasi dan direvisi jika memang dibutuhkan.

C. Sumber Data dan Subjek Penelitian

Sumber data penelitian ini, mengikuti klasifikasi Suharsimi Arikunto (1999, 2002), adalah *paper* dan *person*. Paper yang dimaksud adalah literatur-

literatur/kepuustakaan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan sumber data berupa person dapat juga disebut sebagai subjek penelitian.

Subjek penelitian ini adalah para guru dan siswa-siswa SMP di lokasi-lokasi penelitian sebagaimana di atas. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan kombinasi antara *purposive* dan *snowball*.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Secara umum teknik pengumpulan dan analisis data dibagi menjadi dua kelompok, *desk study* dan *field study*. *Field study* meliputi:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*), untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh aspek yang ditekankan dan relevan dengan masalah penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir yang ditekankan untuk mengungkap informasi yang relevan dengan masalah penelitian.
2. Observasi, untuk memperoleh informasi dengan jalan meninjau obyek penelitian untuk melihat realitas yang terjadi di lapangan.
3. Pilot project, merupakan teknik untuk mengujicobakan model-model tertentu, khususnya rancangan model baru.

Sedangkan *desk study* meliputi :

1. Studi literatur, teknik pemanfaatan data-data sekunder serta data tertulis lainnya mengenai obyek yang diteliti.
2. *Peer Discussion*, diskusi dengan sejawat untuk menguatkan konstruksi analitik dan teoritik hasil sementara analisis data.

3. *Focus Group Discussion (FGD)*, untuk memperkaya dan semacam “uji publik” analisis dan hasil sementara atau *progress* hasil penelitian.

Wawancara mendalam, observasi dan studi literatur digunakan untuk mengeksplorasi akar, anatomi, dan pola kekerasan simbolik, verbal, psikis dan fisik dalam praktek pembelajaran. Tiga teknik tersebut juga digunakan untuk menganalisis konstruksi dan prinsip-prinsip anti kekerasan dalam pembelajaran. PD dan FGD digunakan untuk mematangkan temuan dan mengelaborasi rancangan umum Model *Peace-building Teaching and Learning/Permai*. Sedangkan *pilot project* dilaksanakan untuk uji coba implementasi pembelajaran yang berorientasi kedamaian dan mengandung prinsip-prinsip anti kekerasan.

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data induktif kualitatif. Tahapan analisis yang digunakan adalah: 1) reduksi data, 2) display data, serta 3) kesimpulan dan verifikasi.

(e) Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi, yaitu suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu (Moleong, 2002: 178). Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari *person* dan *paper* (hasil wawancara mendalam dan dokumentasi) atau *paper* dengan *paper*, atau *person* dengan *person* lainnya.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Anatomi Kekerasan dalam Pembelajaran

Begitu banyak aspek dalam anatomi yang telah dan dapat diungkap dalam berbagai penelitian mengenai kekerasan. Setelah melalui wawancara dengan para informan, *peer discussion*, dan *focus group discussion*, anatomi kekerasan dalam penelitian ini dikonstruksi dari beberapa aspek, yaitu: aktor, *locus*, motif, dan bentuk kekerasan.

Aktor kekerasan dalam pembelajaran meliputi pemerintah, guru, dan siswa. Pemerintah terlibat dalam beberapa kekerasan simbolik dalam pembelajaran, khususnya dalam bentuk konten kekerasan simbolik, khususnya dalam bentuk kekerasan-kekerasan yang terdapat dalam buku teks. Beberapa buku teks yang ditulis berdasarkan kurikulum formal, baik sebagai muatan nasional maupun muatan lokal memuat konten kekerasan seperti pembunuhan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya.

Seperti yang telah dipersoalkan oleh banyak kalangan, di sebuah buku pelajaran muatan lokal di DKI Jakarta, yaitu buku pelajaran Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta (PLBJ) untuk sekolah dasar (SD) kelas II terdapat cerita tentang perselingkuhan, istri simpanan, dan memuat aksi kekerasan. Cerita dengan judul “Bang Maman dari Kalipasir” tersebut berkisah tentang kehidupan Bang Maman, seorang pedagang buah yang memiliki anak

bernama Ijah. Bang Maman menikahkan putrinya itu dengan Salim, putra Pak Darip, seorang warga kaya di Kalipasir.

Ketika meninggal, Pak Darip mewariskan kebun yang sangat luas. Salim yang lugu meminta seseorang bernama Kusen untuk mengurus kebunnya. Namun Kusen beserta istrinya malah mengkhianati Salim. Kebun yang luas dijual seluruhnya dan Salim pun jatuh miskin.

Ijah yang telah menjadi istri Salim diminta ayahnya, Bang Maman, untuk menceraikan suaminya itu. Ijah tidak mau dan tetap bersikap setia pada Salim meskipun suaminya itu sedang terpuruk. Bang Maman pun menyusun strategi bagaimana caranya agar Ijah mau menceraikan suaminya itu. Dibuatlah skenario oleh Bang Maman mengenai adanya wanita lain bernama Patme, yang pura-pura mengaku menjadi istri Salim. Patme, atas perintah Bang Maman, mendatangi Ijah dan mengaku bahwa dia merupakan istri simpanan si Salim. Ijah pun percaya pada cerita yang dikarang oleh Bang Maman, dan akhirnya dia menceraikan Salim.

Selain itu, dalam buku Lembar Kerja Siswa terbitan Widya Utama, misalnya, ditemukan cerita tentang "Si Angkri" yang mengandung unsur-unsur kekerasan. Buku yang disediakan untuk anak kelas 1 SD tersebut memuat kisah kekerasan, antara lain berupa pembunuhan.

Sedangkan dalam sebuah buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 SD, terdapat kekerasan dalam cerita soal Rosim yang badannya ditusuk-tusuk dengan tusuk konde oleh majikannya, yaitu Nyonya Van Der Book. Pada sebuah bagian cerita digambarkan dengan jelas dan gamblang bahwa si nyonya rumah tersebut

mengikat tangan Rosim dengan kain. Kain itu kemudian dibasahi dengan minyak, lalu dibakar.

Di samping itu, juga ditemukan materi vulgar berkaitan dengan seks dalam buku pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam buku “Aku Senang Belajar Bahasa Indonesia” yang ditulis dan digunakan untuk SD/MI kelas IV ini terdapat cerita berjudul “Anak Gembala dan Induk Serigala”. Cerita itu mengisahkan mengenai seorang perempuan yang hamil karena diperkosa. Perempuan itu kemudian diceritakan menjadi pekerja seks komersial di warung remang-remang. Beberapa bagian dari cerita tersebut menggambarkan adegan percumbuan dan beberapa bentuk adegan dan tindakan lain yang cocok sebagai konsumsi orang dewasa.

Kekerasan-kekeraan dalam buku pelajaran tersebut tidak dapat dilimpahkan hanya kepada guru atau penulis, apalagi hanya kepada guru pengguna buku pelajaran di sekolah. Dalam beberapa kasus, buku-buku “bermasalah” yang dikonsumsi guru-guru dan para murid di sekolah telah dinyatakan lolos penilaian dan secara formal telah mendapat label “Berstandar Nasional BSNP”. Kelalaian pihak pemerintah terutama terjadi dalam bentuk lemahnya mekanisme penilaian sekaligus lemahnya kinerja penilai buku. Sebagaimana jamak diketahui mekanisme penilaian buku selama ini lebih banyak menggunakan “kejar setoran” dan “sistem kebut semalam”, dimana seorang penilai buku memiliki *load* menilai buku yang relatif banyak dalam waktu yang singkat.

Di level selanjutnya, kelalaian juga terjadi dalam bentuk mis-distribusi. Misalnya dalam kasus beberapa buku bermuatan kekerasan di Kalimantan. Menurut konfirmasi penulisnya, beberapa tulisan di dalam sebuah buku yang

dipermasalahan memang tidak ditulis untuk satuan pendidikan SD/MI, akan tetapi SMP/MTs. Jadi, ketika terjadi pencetakan buku SMP/MTs yang telah dibeli pemerintah untuk SD/MI, hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah yang tidak bisa dilimpahkan semata-mata kepada penulis dan sekolah atau guru pengguna buku tersebut.

Di samping aktor berupa pemerintah, kekerasan juga dilakukan oleh guru sebagai aktor. Beberapa kekerasan yang dilakukan oleh guru dapat berupa kekerasan verbal, fisik, dan psikis. Kekerasan verbal biasanya dalam bentuk-bentuk kata-kata kasar, seperti “bodoh”, “gila”, “*ga* cerdas!”, “tolol!”, dan lain sebagainya.

Sedangkan kekerasan fisik terjadi dalam bentuk tindakan seperti menampar siswa, melempar penghapus, menyorokkan kepala siswa, membanting pintu, menggebrak meja, dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut merupakan ekspresi kemarahan guru, peringatan di kelas (misalnya ketika suasana kelas tidak kondusif), sanksi untuk siswa, dan lain-lain.

Kekerasan psikis juga dilakukan oleh guru. Beberapa contoh kekerasan secara psikis yang dipertontonkan oleh guru adalah mengintimidasi siswa dengan ancaman-ancaman seperti strap, pemberian nilai jelek, tampilan guru “*killer*”, dan sebagainya.

Aktor kekerasan yang lain juga siswa. Siswa kerap melakukan tindakan kekerasan terhadap siswa lainnya. Kekerasan tersebut misalnya berupa *bullying* dalam beberapa situasi, antara lain dalam keadaan seorang teman di kelasnya

tidak dapat menjawab pertanyaan guru, atau dalam keadaan yang memungkinkan pelecehan karena alasan fisik seorang siswa sekelas, dan lain sebagainya.

Sementara itu aspek yang kedua, yaitu *locus* kekerasan dalam pembelajaran, pada umumnya terdapat di dalam ruang-ruang kelas, baik itu dalam bentuk buku atau materi pembelajaran, atau dalam bentuk perilaku kekerasan nyata di dalam kelas. Keberadaan kelas sebagai ruang kekerasan jelas merupakan sebuah ironi bagi dunia pendidikan.

Sedangkan motif kekerasan yang terdapat di dalam pembelajaran antara lain: *pertama*, kelalaian. Kelalaian tersebut terjadi dalam kekerasan simbolik yang dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk kegagalan meloloskan atau mengawasi buku-buku pelajaran yang memuat konten kekerasan. *Kedua*, lemahnya kesadaran dan kompetensi. Sebagian besar guru ketika melakukan tindakan kekerasan seperti dibahas di muka, melakukannya tanpa kesadaran bahwa hal itu dapat mengkonstruksi karakter dan watak kekerasan dalam diri siswa. Beberapa guru barangkali memiliki niat baik untuk mendidik siswa, misalnya dalam bentuk ancaman dan penghukuman secara fisik. Namun, bentuk “pendidikan” demikian merupakan gambaran inkompetensi yang bersangkutan, terutama pada aspek kompetensi paedagogis.

Ketiga, balas dendam. Hal itu pada umumnya terjadi dalam tindak kekerasan seorang siswa atau beberapa orang siswa yang dilakukan atas teman siswa lainnya. Jika seorang siswa, pada suatu kesempatan menjadi obyek bullying dari situasi tertentu yang menyimpannya, yang bersangkutan kemudian mencatat atau menandai siapa yang mem-bully-nya itu, untuk kemudian pada kesempatan

yang lain jika memungkinkan yang bersangkutan untuk mem-*bully* orang itu, maka akan terjadilah pembalasan dendam itu.

Keempat, kultur. Beberapa sekolah memiliki “kultur” kekerasan dalam pembelajaran, sehingga kekerasan dapat dengan mudah direproduksi kelas. Sehingga setelah keluar kelas, sangat mudah terjadi tawuran massal, tidak hanya antar sekolah, bahkan antar kelas dalam satu sekolah, atau antar geng dalam sekolah tersebut.

Bentuk-bentuk kekerasan, sebagai irisan dengan aspek lain dalam anatomi kekerasan, barangkali sudah dapat dengan mudah terbaca dalam pembahasan tersebut di atas. Namun secara elaborative, bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat diulas lebih mendalam lagi dengan perspektif teori tertentu yang lebih kuat.

Dalam pandangan teori kritis dan progresif, pendidikan dipandang sebagai salah satu *locus* terjadinya kekerasan. Kekerasan tersebut terjadi dalam beberapa bentuk yang tidak terlihat (atau di bawah permukaan). Sebelum membahas lebih lanjut pola-pola kekerasan yang ditemukan oleh Peneliti dalam proses penumpukan data, baik melalui wawancara dengan beberapa praktisi pendidikan di persekolahan, telaah berbagai buku, serta *peer discussion*, perlu dikemukakan terlebih dahulu kerangka analisis yang relevan.

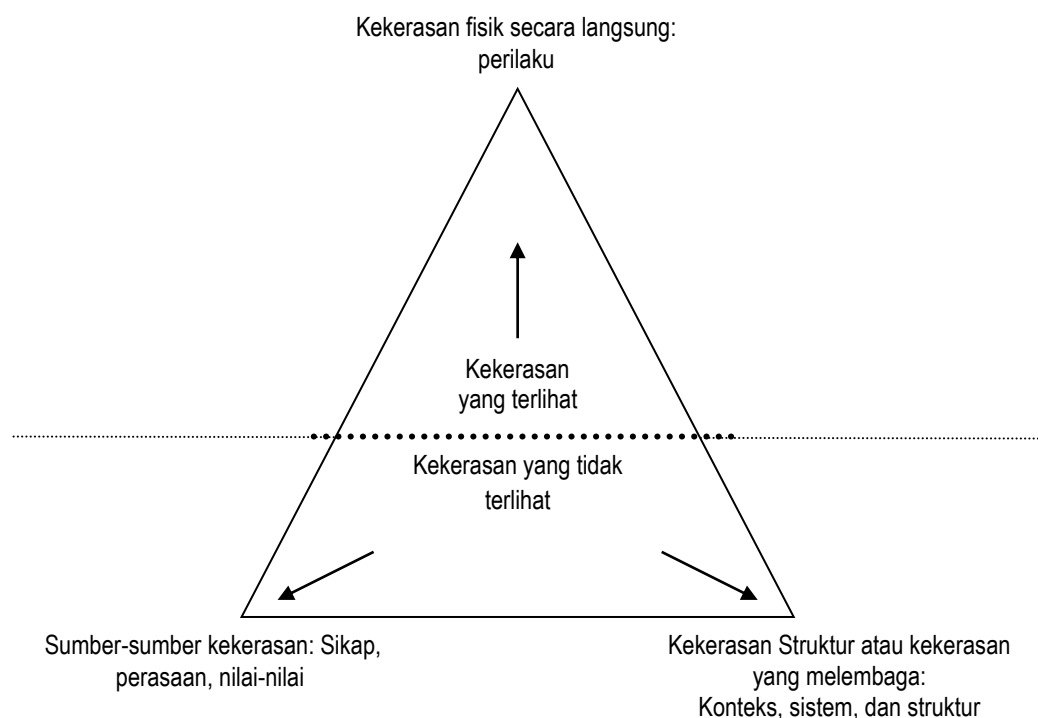
Johan Galtung (2003: 438) membagi kekerasan menjadi tiga tipologi: yaitu kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan kekerasan struktural. Yang dimaksud kekerasan langsung adalah kekerasan yang terjadi dalam bentuk sebuah peristiwa. Kekerasan struktural adalah kekerasan dalam sebuah proses. Sedangkan kekerasan kultural adalah sebuah kekerasan yang bersifat relatif permanen dan

berada di bawah permukaan. Secara sederhana, ketiga tipologi kekerasan ini dapat dianalogikan dengan gempa bumi antara gempa bumi sebagai suatu peristiwa (kekerasan langsung), gerakan-gerakan lempeng tektonik sebagai sebuah proses (kekerasan struktural), dan garis-garis retakan sebagai suatu kondisi yang permanen (kekerasan kultural). Dengan mengambil analogi gempa bumi tersebut, maka tampak bahwa masing-masing tipe memiliki titik waktu yang berbeda satu sama lain dan terjadi dalam lapisan yang berbeda-beda satu sama lain.

Dengan analogi tersebut tampak bahwa kekerasan dalam tipologi Galtung memiliki tingkatan-tingkatan atau stratifikasi. Tingkatan paling dalam kekerasan adalah kekerasan kultural, dimana kekerasan berada dalam level yang laten dan dapat mendorong atau memicu dua kekerasan lainnya, yaitu struktural dan langsung. Strata berikutnya dari sebuah kekerasan adalah kekerasan struktural berupa riak-riak kekerasan yang melokal dan merupakan aktivitas berpola dari kekerasan kultural. Di level yang paling permukaan, kekerasan yang tampak oleh mata berupa kekerasan langsung yang dilakukan oleh manusia terhadap yang lain.

Kekerasan langsung mewujudkan dalam perilaku, misalnya pembunuhan, pemukulan, intimidasi, penyiksaan. Kekerasan struktur atau kekerasan yang melembaga mewujudkan dalam konteks, sistem, dan struktur, misalnya diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan. Kekerasan kultural mewujudkan dalam sikap, perasaan, nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, misalnya kebencian, ketakutan, rasisme, seksisme, ketidaktoleranan (Fisher, et.al, 2001: 10). Menurut sifatnya kekerasan ada 2 (dua) yaitu kekerasan personal dan

kekerasan struktural. Kekerasan personal bersifat dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. Kekerasan struktural mengambil bentuk-bentuk seperti eksploitasi, fragmentasi masyarakat, rusaknya solidaritas, penetrasi kekuatan luar yang menghilangkan otonomi masyarakat, dan marginalisasi masyarakat sehingga meniadakan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan tentang nasib mereka sendiri. Kekerasan struktural ini juga menimbulkan kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, ketidakadilan sosial, dan alienasi atau peniadaan individual karena proses penyeragaman warga Negara (Justin Sihombing, 2005: 8-9). Gambar berikut mendeskripsikan keterkaitan bentuk-bentuk kekerasan.



Gambar 1. Sikap, perilaku dan konteks kekerasan
Sumber : Simon Fisher, *et.al*, (2001: 10)

Sebangun dengan pendekatan Galtung tersebut, teori Spiral Kekerasan Dom Helder Camara dapat dijadikan sandaran analisis untuk memotret dan memetakan tindak kekerasan sehingga memperoleh gambaran yang utuh. Teori ini melandaskan dari bekerjanya 3 (tiga) bentuk kekerasan yang bersifat personal, institusional, dan struktural, yaitu ketidakadilan, perlawanan masyarakat sipil, dan represi negara. Dari ketiga bentuk kekerasan itu yang paling mendasar dan menjadi sumber utama adalah ketidakadilan. Ketidakadilan ini bermula dari kebijakan yang tidak berpihak pada sekelompok masyarakat khususnya masyarakat marjinal.

Selanjutnya Ted Robert Gurr mengemukakan teori bahwa kekerasan muncul karena deprivasi relatif yang dialami masyarakat maupun individu. Deprivasi relative dimaknai sebagai perasaan kesenjangan antara nilai harapan (*value of expectations*) dan kapabilitas nilai (*value capabilities*).

Dilihat dari kacamata waktu dan strata kehidupan, pendidikan mengandung nuansa kebertingkatan. Di satu pihak, karena merupakan sebuah proses maka pendidikan memuat pentahapan. Dilain pihak, karena ada pendidik dan ada peserta didik, maka pendidikan mengenal perbedaan status. Karena kenyataan, pendidikan amat rentan terhadap kekerasan. Oleh karenanya bagaimana pentahapan waktu dan perbedaan strata kestatusan itu harus dikelola, sehingga pendidikan mampu menjadi sarana pemberdayaan, pengayaan dan tidak melindas nilai-nilai kemanusiaan, seperti kemerdekaan, hormat pada pribadi dan keadilan (Francis Wahono, 2003: 232)

Dalam bidang pendidikan bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana menjadi tesis Galtung terjadi melalui praktik-praktik dan pelaku yang berbeda. Untuk melihat bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam bidang pendidikan memerlukan tinjauan dari segi ekonomi-sosial dan segi teknologi-manajerial. Dari segi tinjauan ekonomi-sosial, yang dimaksudkan dengan bangunan pendidikan adalah segala unsur yang membentuk pendidikan. Kecuali pelaku utama pendidik dan peserta didik, unsur-unsur itu antara lain adalah pendekatan, sistem, dan metode pendidikan. Lain dari tinjauan ekonomi-sosial, tinjauan teknologi-manajerial membedakan bangunan pendidikan ke dalam 3 (tiga) unsur: kerangka, pranata, dan kurikulum. Kalau tinjauan teknologi-manajerial melihat ketiga unsur tersebut secara terpisah, maka tinjauan ekonomi-sosial melihatnya sebagai unsur yang saling berkaitan. Maka kalau berbicara mengenai unsur pendekatan pendidikan kendati maksud utama adalah kerangka, kita tidak dapat memisahkannya dari pranata dan kurikulum. Kalau kita berbicara mengenai unsur sistem pendidikan kendati maksud yang kita utamakan adalah pranata, kita tidak dapat memisahkannya dari kerangka dan kurikulum. Demikian juga kalau kita berbicara mengenai unsur metode pendidikan kendati maksud yang kita utamakan adalah kurikulum, kita tidak dapat memisahkannya dari kerangka dan pranata (Francis Wahono, 2003: 238).

Unsur-unsur pokok bangunan pendidikan, selain pelaku utama yakni pendidik dan peserta didik, juga meliputi kerangka, pranata, dan kurikulum pendidikan (dalam hal ini juga buku teks yang diturunkan dari kurikulum). Pendidik dapat terdiri dari dosen, guru, pemimpin, orang tua, media massa,

orang dewasa, dan masyarakat pada umumnya. Peserta didik dapat mencakup anak-anak, remaja, rakyat, dan berbagai lapisan serta golongan masyarakat. Kerangka pendidikan adalah visi, misi, filsafat, dan berbagai teori-teori dasar pendidikan serta acuan undang-undang dan peraturannya. Pranata pendidikan adalah sarana-sarana pendidikan, gedung, lapangan, tempat pertemuan, konteks masyarakat, alat-alat peraga, buku-buku, jurnal, berbagai produk media massa, laboratorium sampai kepada sumber *budget* pendanaannya. Kurikulum pendidikan adalah berbagai isi—baik itu berupa nilai yang dirumuskan maupun implementasi dari nilai tersebut—serta ilmu pengetahuan yang dikelola dan disampaikan secara sistematis. Kelima unsur tersebut diikat oleh tinjauan ekonomi sosial sebagai pendekatan, sistem, dan metode (Francis Wahono, 2003: 238).

Apabila pendekatan Galtung dijadikan pisau analisis maka kekerasan langsung terjadi pada unsur bangunan pendidikan yakni pelaku utama pendidikan. Kekerasan ini bersifat horizontal, individu *versus* individu yang lain. Bentuk kekerasan struktural dan kultural terjadi pada unsur selain pelaku utama pendidikan. Kekerasan ini mewujudkan dalam kerangka pendidikan, pranata pendidikan, dan kurikulum pendidikan. Kekerasan ini bersifat vertikal karena melibatkan negara melalui aparatus, institusi, dan kebijakan *versus* masyarakat.

Dalam deskripsi hasil penelitian selanjutnya, perspektif Galtung akan digunakan untuk menjelaskan dua “arah” kekerasan tersebut, namun dalam lingkup mikro pembelajaran di kelas-kelas.

Dengan demikian, di dalam praktek pembelajaran, bentuk-bentuk kekerasan di dalam kelas dapat dikategorikan ke dalam dua kategori besar, yaitu struktural

dan kultural. Kekerasan dalam katagori struktural terjadi dari guru kepada siswa, juga dari pemerintah yang berurusan dengan perbukuan (Puskurbuk) terhadap siswa. Terdapat beberapa kekerasan yang dilakukan oleh guru (juga pemerintah dalam tingkatan tertentu) terhadap siswa di dalam praktek pembelajaran di kelas, yaitu;

1. Kekerasan fisik, misalnya melempar kapur atau spidol atau *eraser* kepada siswa. Termasuk kekerasan fisik adalah menyetrap siswa karena tidak tahu atau tidak bisa menjawab pertanyaan guru, dan sejenisnya
2. Kekerasan verbal, yaitu kekerasan secara lisan dalam bentuk kata-kata. Sebagaimana diulas di muka, kekerasan verbal dapat berupa kata-kata kasar yang mengandung unsur kekerasan seperti penghinaan atau pelecehan atas “kelemahan” siswa.
3. Kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik ini dapat terwujud dalam dua bentuk. *Pertama*, kekerasan dalam bentuk simbol-simbol yang bisa diindera oleh panca indera yang terdapat dalam buku pelajaran (dalam hal ini Pemerintah juga turut sebagai aktor kekerasan struktural) dan digunakan di dalam pembelajaran. *Kedua*., kekerasan dalam bentuk simbol-simbol yang digunakan di dalam praktek pembelajaran guru, baik sebagai media yang menunjang pembelajaran, seperti gambar atau fisik senjata tajam, juga sikap simbolik, seperti keengganan guru untuk mengakui atau minta maaf atas kesalahan yang dilakukan di dalam pembelajaran.

Sedangkan kekerasan kultural berlangsung dalam kontinum horizontal, dari siswa yang satu kepada siswa lainnya.

1. Kekerasan terbuka:

- a. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang dimaksud, antara lain memukul teman sesama siswa, dengan alat atau dengan tangan kosong. Juga dalam bentuk “menjorokkan” kepala teman siswa lainnya.
- b. Kekerasan verbal, termasuk di dalamnya ada *bullying*. Kekerasan verbal antar siswa juga terjadi sebagaimana halnya dalam kasus kekerasan verbal dari guru kepada siswa atau subjek didik.

Sebagaimana dikutip dalam situs www.psychologymania.com, yang dimaksud *bullying* adalah kekerasan yang antara lain mengandung keinginan untuk menyakiti, tindakan negatif, ketidakseimbangan kekuatan, pengulangan atau repetisi, bukan sekedar penggunaan kekuatan akan tetapi juga kesenangan yang dirasakan oleh pelaku, dan adanya rasa tertekan di pihak korban (Rigby, 2003). Sedangkan Coloroso (2006) mengemukakan bahwa *bullying* akan selalu melibatkan ketiga unsur berikut;

- 1) Ketidakseimbangan kekuatan (*imbalance power*). Bullying bukan persaingan antara saudara kandung, bukan pula perkelahian yang melibatkan dua pihak yang setara. Pelaku bullying bisa saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat,

lebih mahir secara verbal, lebih tinggi secara status sosial, atau berasal dari ras yang berbeda;

- 2) Keinginan untuk mencederai (*desire to hurt*). Dalam bullying tidak ada kecelakaan atau kekeliruan, tidak ada ketidaksengajaan dalam pengucilan korban. Bullying berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, melibatkan tindakan yang dapat melukai, dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan penderitaan korbannya;
- 3) Ancaman agresi lebih lanjut. *Bullying* tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang hanya terjadi sekali saja, tapi juga repetitif atau cenderung diulangi;
- 4) Teror. Unsur keempat ini muncul ketika eskalasi *bullying* semakin meningkat. *Bullying* adalah kekerasan sistematis yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror bukan hanya sebuah cara untuk mencapai *bullying* tapi juga sebagai tujuan *bullying*.

2. Kekerasan tertutup:

- a. *Bullying*, sebagaimana dijelaskan di muka, *bullying* dapat saja terjadi dalam “ruang-ruang” tertutup dan di bawah permukaan. Paling tidak, terjadi secara diam-diam di kelas atau di luar kelas tanpa sepengetahuan para guru atau teman.
- b. Intimidasi, yaitu berupa ancaman-ancaman yang diberikan oleh seorang siswa kepada siswa yang lain.

- c. Pelecehan seksual. Menurut narasumber, pelecehan seksual juga pernah terjadi dalam pembelajaran, terutama dalam bentuk yang ringan, seperti meraba-raba atau mengelus-elus anggota tubuh teman atau siswa perempuan.

B. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Demokratis dan Damai

Pembelajaran demokratis dan damai dapat dikombinasikan dari berbagai doktrin filosofis dari beberapa pakar, tokoh, dan filsuf. Dua dari sekian tawaran paradigmatis yang bisa digunakan untuk mengonstruksi pembelajaran demokratis dan damai adalah prinsip-prinsip anti kekerasan (*nonviolence principles*), toleransi dan nondiskriminasi (*principles of nondiscrimination*).

Prinsip-prinsip anti kekerasan yang dapat diadopsi antara lain dari dua tokoh besar dunia, yaitu Martin Luther King Jr dan Mahatma Gandhi. Sebagaimana sering dibahas dalam forum-forum akademik mengenai *non violence* (beberapa situs *online* menyajikan kajian ini, antara lain wikipedia.org, mlkday.gov, dan www.cpt.org). Berkaitan dengan itu, King mengajukan beberapa prinsip anti kekerasan, sebagai berikut:

1. Anti kekerasan merupakan jalan hidup orang-orang pemberani.

Prinsip tersebut bermakna bahwa untuk menjadi orang yang menjadikan anti kekerasan sebagai pilihan utama dalam bersikap atas apapun dalam hidupnya membutuhkan keberanian yang luar biasa. Prinsip tersebut dapat diderivasi lagi menjadi beberapa prinsip turunan, antara lain, bahwa orang yang antikekerasan adalah orang-

orang yang menolak atau tidak mau berbuat jahat. Selain itu, orang yang antikekerasan itu kuat dan tangguh secara spiritual, emosional, dan mental. Anti kekerasan itu berarti mempersuasi siapapun yang menentang kebenaran yang coba disampaikan. Jadi, perlawanan terhadap yang berlawanan itu sifatnya pasif, bukan agresif (menyerang),

2. Anti-kekerasan berusaha untuk memenangkan persahabatan dan pemahaman (*understanding*)

Prinsip ini menegaskan bahwa ketika kita mengedepankan sikap dan tindakan anti kekerasan itu bermakna bahwa kita menjunjung tinggi persahabatan dan mengedepankan pemahaman satu dengan yang lain. Prinsip tersebut dapat diturunkan lagi menjadi beberapa derivat. Antara lain bahwa ujung dari sikap dan tindakan anti kekerasan itu adalah pertobatan dan rekonsiliasi. Tujuan dari sikap dan tindakan antikekerasan adalah terwujudnya masyarakat penuh cinta (*the Beloved Community*).

3. Anti kekerasan berusaha untuk mengalahkan ketidakadilan, bukan orang-orang.

Prinsip ini menekankan bahwa antikekerasan tidak memusuhi manusia akan tetapi substansi ketidakadilan yang terjadi. Antikekerasan berarti mengakui bahwa orang yang melakukan kejahatan juga merupakan korban, jadi bukan orang yang sejatinya

jahat. Karena itu anti kekerasan berusaha mengalahkan kejahatan, bukan orangnya.

4. Anti kekerasan berpegang teguh bahwa penderitaan itu dapat mendidik dan mengubah (mentransformasi).

Prinsip ini menegaskan bahwa anti kekerasan itu memiliki fungsi yang luar biasa yaitu mendewasakan dan mematangkan, bahkan mentransformasi seseorang dari sebuah situasi ke situasi yang lebih baik. Karena itu penderitaan akan diterima secara sukarela tanpa keinginan untuk balas dendam, tindakan apapun yang diambil akan diterima beserta dengan konsekuensi-konsekuensinya. Maka, setiap situasi, termasuk penderitaan akan membuka berbagai peluang perbaikan dan kesempatan-kesempatan untuk menjadi lebih baik.

5. Anti kekerasan itu memilih untuk mencintai, bukan membenci

Cinta merupakan salah satu kata kunci utama sikap dan tindakan anti kekerasan. Anti kekerasan menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun spirit. Dan membenci merupakan sebarang semangat dari kekerasan. Maka, hal itu harus dan sangat dihindari. Cinta anti kekerasan memiliki kekuatan yang tak pernah habis untuk memaafkan dan dalam rangka mengembalikan masyarakat pada situasi semula. Cinta anti kekerasan bersifat spontan, tidak ada motivasi terselubung, tidak egois, dan bersifat kreatif.

6. Anti kekerasan meyakini bahwa alam semesta akan berada dalam keadilan dengan itu.

Anti kekerasan pada akhirnya memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa keadilan akan memenangkan pertarungan. Dan keadilan yang dimaksud tentulah keadilan Tuhan (*God justice*).

Sedangkan dalam ajaran Mahatma K Gandhi, antikekerasan (*non violence*) itu merupakan realisasi dari kebenaran sebagai agama seluruh manusia. Prinsip-prinsip di dalamnya menurut Gandhi adalah:

1. Menghormati (*respect*)
2. Memahami (*understanding*)
3. Menerima (*acceptance*)
4. Menghargai perbedaan (*appreciating differences*)
5. Kebenaran dan kesejatan (*truth and truthfulness*)
6. Menyerap atau mendalami penderitaan (*absorbing suffer*)
7. *Ahimsa* terhadap musuh
8. Perwalian dan tindakan konstruktif

Di samping itu prinsip pembelajaran demokratis dan damai juga dapat dikombinasikan secara sistematis dari prinsip-prinsip non diskriminasi dan sekaligus toleransi. Toleransi, menurut Thomas Scanlon, berkenaan dengan kesadaran moral yang dapat dimengerti dengan mengajukan pertanyaan “what we owe to each other?” (kita berhutang apa pada sesama kita?). Secara konseptual, toleransi dalam pandangan Scanlon meniscayakan kita untuk menerima dan merelakan orang lain untuk melaksanakan hal-hal yang bahkan

kita tidak sepakat mengenai itu. Dengan demikian, toleransi itu melibatkan sebuah tingkah laku yang mengintermediasi dua situasi sekaligus: yaitu antara penerimaan sepenuh hati dengan ketidaksepakatan yang tak tertahankan.

Dengan demikian, toleransi sesungguhnya merupakan situasi yang unik karena dia mengantarai pertentangan dua situasi dalam diri, yaitu penerimaan dan ketidaksetujuan. Mengacu pada Scanlon, toleransi memiliki beberapa dimensi: personal, etik, dan spiritual. Secara personal seseorang dengan sepenuh hati mengakui dan menerima keberadaan sistem nilai orang lain di luar dirinya yang dia tidak bersepakat dengan itu. Namun, posisi aslinya tidak berkurang dari sistem nilainya sendiri yang diyakininya. Secara etik, seseorang memberikan kesempatan sepenuh hati kepada yang berbeda untuk menjalankan apa-apa yang tidak disetujuinya itu. Secara spiritual, semua orang akan semakin berkesempatan untuk meningkatkan kedalaman religiusnya sesuai dengan keluhuran ajaran keluasan cakrawala maslahat agama yang diyakininya.

Situasi oposit dari toleransi adalah intoleransi. Intoleransi menurut norma *Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*, yaitu sebuah norma HAM Internasional mengenai penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi agama/keyakinan, dinyatakan sebagai setiap pembedaan, pengabaian, larangan, atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau keyakinan, dan yang tujuan atau akibatnya meniadakan atau mengurangi

pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi atas dasar kesetaraan.

Sedangkan non diskriminasi merupakan situasi tiada diskriminasi. Diskriminasi sendiri menurut norma UU Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai:

... pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Lokus diskriminasi dengan demikian terletak pada beberapa aspek: tindakan, maksud/tujuan, dan dampak. Dalam aspek tindakan diskriminasi terjadi dalam bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung. Dalam aspek maksud/tujuan berarti tindakan tertentu memang dimaksudkan atau diniatkan oleh pelakunya untuk menimbulkan akibat terdiskriminasinya seseorang. Sedangkan pada aspek dampak dapat dilihat dari akibat yang timbul dari tindakan-tindakan pembatasan, pelecehan, atau pengucilan tersebut.

Non diskriminasi beserta kesetaraan di depan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi merupakan prinsip dasar dan umum sehubungan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Prinsip anti kekerasan, toleransi dan anti diskriminasi akan memberikan perspektif dan pendasaran konseptual dalam pengembangan pembelajaran yang

demoratis dan damai di kelas-kelas pembelajaran. Kombinasi ketiganya dapat menjadi dasar bagi pengembangan model pembelajaran rajut damai (*peace building teaching and learning*).

Dengan demikian, dari ketiga teori dan konsep tersebut dapat dikembangkan beberapa nilai acuan, antara lain:

1. Menghormati (*respect*),
2. Memahami (*understanding*),
3. Menerima (*acceptance*),
4. Menghargai perbedaan (*appreciating differences*),
5. Berhutang kepada orang lain (*owing the others*), dan
6. Berempati atau mendalami penderitaan orang lain (*absorbing suffer*).

C. Model *Peace-Building Teaching and Learning* sebagai Pembelajaran Anti Kekerasan

Model *Peace-building Teaching and Learning* merupakan salah satu bentuk intervensi melalui pendidikan formal untuk mencegah maraknya tindakan kekerasan di tengah-tengah masyarakat. Elaborasi atas model ini dapat dielaborasi melalui dimensi-dimensi berikut:

1. Jenis pembelajaran: Pembelajaran bersama secara tematik
2. Sasaran: jenjang pendidikan SMP
3. Pendekatan pokok:

- a. Pembelajaran integratif, meliputi penerapan ucapan atau kata-kata non kekerasan, sikap-sikap non kekerasan, dan tindakan-tindakan non kekerasan.
 - b. Belajar bersama, meliputi refleksi dan *brainstorming*, elaborasi dan eksplorasi, *problem solving*, serta refleksi.
4. Materi: Demokrasi, Deliberasi (Musyawarah), *Peaceful Co-existence*, Anti kekerasan (*Non-violence*), dan Membangun Komunitas Anti-kekerasan (*Non-violence Community Building*).
 5. Fasilitator: Orang dewasa (guru/orang dewasa lain) dan/atau sebaya

Model *Peace-building Teaching and Learning* dapat dilaksanakan dalam dua lingkup, integratif dalam pembelajaran formal serta pendekatan belajar bersama dalam pembelajaran informal. Keduanya dapat dikembangkan dengan target utama menjadikan masyarakat sosial berbasis sekolah yang cinta damai dan anti kekerasan.

Dalam lingkup yang pertama, pelaksanaan Model *Peace-building Teaching and Learning* dapat dilaksanakan dengan mengacu pada rancangan berikut:

Aspek	Deskripsi	Keterangan
Aktor	Guru bersama para siswa	Guru memposisikan diri sebagai pamong
Atribut simbolik	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari penggunaan symbol-simbol kekerasan, seperti senjata tajam. - Menghindari penggunaan materi ajar yang menunjukkan simbol kekerasan, seperti gambar 	

	penyiksaan atau kekerasan seksual dalam buku ajar.	
Atribut verbal	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari penggunaan kata-kata kasar, apalagi dengan motif untuk melecehkan, melemahkan, dan menghina orang lain, dalam relasi guru-siswa dan siswa-siswa 	
Atribut fisik	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari secara mutlak penggunaan kekerasan fisik dalam bentuk apapun dalam keadaan negatif yang tak diinginkan seperti apapun - Guru harus mengingatkan, melarang, dan mencegah penggunaan kekerasan fisik dalam pembelajaran 	
Sikap dan tindakan konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> - Membiasakan penggunaan “maaf, tolong, dan terima kasih” sesuai dengan konteksnya di dalam pembelajaran - Membangun kebiasaan memahami (<i>understanding</i>) dan menerima (<i>accepting</i>) perbedaan satu sama lain - Menggunakan bahasa tubuh untuk mempertegas kelemahlembutan (anti kekerasan) - Mengakui kesalahan jika memang terjadi kesalahan serta meminta maaf untuk itu - Memberikan ruang kepada orang lain untuk melakukan 	<p>Misal, kalimat “Terima kasih atas perhatian dan partisipasi siswa sekalian dalam pembelajaran ini” dapat diucapkan setiap selesai pembelajaran dengan variasi kalimat</p> <p>Seperti, perbedaan pandangan dan latar belakang alamiah setiap orang</p> <p>Misal memberi dan mengarahkan dengan tangan terbuka ketika menyilahkan siswa untuk menulis jawaban kuis di papan tulis, atau mengatupkan dua tangan keyika mengatakan “terima kasih” atau “maaf”</p>

	koreksi atau perbaikan secara santun dan beradab	
--	--	--

Dalam lingkup yang kedua, yaitu dengan pendekatan “Belajar Bersama” dalam sebuah pembelajaran informal. Aspek kompetensi yang dapat dicapai melalui belajar bersama ini dalam kerangka *peace-building* antara lain adalah:

1. Melakukan/mengalami,
2. Mengungkapkan
3. Menganalisis
4. Menyimpulkan
5. Menerapkan

Pelaksanaan Model *Peace-building Teaching and Learning* tidak hanya dilakukan sekali, namun dilaksanakan secara tematik dengan mengacu pada rancangan dan tahapan-tahapan berikut:

Tahapan	Deskripsi/Tujuan	Aspek Kompetensi	Ket.
Persiapan/ pengkondisian	Guru/fasilitator (beserta siswa atau subjek didik) mempersiapkan ruang kelas, sumber belajar,		5”
Pelaksanaan: 1) Membangun suasana awal	- Dimaksudkan untuk mewujudkan rasa kebersamaan dan kesetaraan di antara para subjek belajar (guru/fasilitator, dan para siswa)	Melakukan/mengalami, Mengungkapkan	10”
2) Refleksi/ Eksplorasi/	- Mengundang siswa untuk merenungkan	Melakukan/mengalami,	20”

Brainstorming/	<p>pengalaman masing-masing atau pengalaman orang lain sebagai “objek penderitaan/situasi negatif” yang ditimbulkan oleh kata-kata, sikap, dan perilaku orang lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eksplorasi dan brainstorming mengenai pengalaman tersebut dilakukan dengan pola: 5W 1H - Mengonstruksi tindakan resolutif atau <i>healing measures</i> atas pengalaman tersebut 	Mengungkapkan, Menganalisis, Menyimpulkan,	
3) Menganalisis tema tertentu dalam perspektif “ <i>non violence</i> ”, seperti “Dinamika masyarakat dalam pemilihan kepala desa”	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis tema dapat dilakukan melalui nonton film, bedah kasus, <i>role playing</i>, <i>modelling</i>, dan kegiatan lain yang relevan yang memuat konten yang meliputi: demokrasi, deliberasi (Musyawarah), <i>peaceful co-existence</i>, anti kekerasan (<i>Non-violence</i>), dan membangun komunitas anti-kekerasan (<i>non-violence community building</i>). - Konten tema disesuaikan dengan usia dan psikologi perkembangan remaja SMP - Tema mengandung 	Melakukan/mengalami, Mengungkapkan, Menganalisis, Menyimpulkan, Menerapkan	30”

	<p>masalah riil kekerasan yang dapat dianalisis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan merumuskan secara bersama-sama sikap dan tindakan ideal untuk merespons situasi problematik kekerasan di dalam tema tersebut 		
4) Authentic assesement dan refleksi	<ul style="list-style-type: none"> - Subjek belajar distimulus untuk mengajukan opini, menggali sikap, dan mengekspresikan tindakan melalui kasus replikatif/mirip dengan masalah di dalam langkah 3) - Subjek belajar secara acak diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi atas pengalaman belajar bersama, baik dalam hal konten maupun proses 	Mengungkapkan, Menyimpulkan, Menerapkan	15"

BAB V

RENCANA TAHUN SELANJUTNYA

Penelitian ini merupakan program yang direncanakan bersifat multitalun. Pada tahun kedua, penelitian ini direncanakan untuk menuntaskan rencana tahap selanjutnya yang terdiri dari lima tahap substantif:

Pertama, persiapan. Persiapan yang akan banyak dilakukan adalah persiapan di tingkat teknis berkaitan dengan persiapan penelitian tahap selanjutnya, mulai dari persiapan presentasi hingga penyiapan personalia dengan pembagian tugas dan tanggungjawab yang sudah dibagi sesuai dengan berbagai aktivitas dalam kegiatan penelitian. Di samping itu juga akan dilakukan persiapan-persiapan di level akademis, seperti penelusuran bahan-bahan pengayaan untuk mengembangkan modul Model *Peace-building Teaching and Learning* dengan pendekatan belajar bersama. Penelusuran buku-buku dan jurnal-jurnal untuk menyusun modul lengkap Model *Peace-building Teaching and Learning* dengan pendekatan Belajar Bersama akan dilakukan pada tahap ini.

Kedua, pengembangan modul Model *Peace-building Teaching and Learning* untuk dengan pendekatan Belajar Bersama. Modul ini akan memuat aspek material dan procedural pembelajaran dengan pendekatan bersama Model *Peace-building Teaching and Learning*. Modul ini di akhir program penelitian direncanakan untuk diterbitkan menjadi buku ber-ISBN.

Setelah modul dikembangkan akan dilaksanakan tahap ketiga, yaitu pelatihan guru-guru. Pelatihan ini meliputi dua pendekatan pembelajaran, yaitu

pembelajaran integratif dan belajar bersama. Pelatihan ini akan diselenggarakan satu kali dengan peserta yang meliputi minimal 5 (lima) wilayah sesuai dengan *coverage* pengumpulan data pada penelitian tahun pertama, yaitu meliputi Yogyakarta, Medan, Makassar, Mataram, dan Pontianak. Pelatihan ini akan menghadirkan tim peneliti sebagai narasumber sekaligus trainer dengan fasilitator dari pihak di luar tim peneliti sepanjang hal itu diperlukan.

Training tersebut akan diikuti oleh beberapa guru sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tahap selanjutnya yaitu *pilot project* di minimal 5 (lima) sekolah dimana perwakilan guru sekolah tersebut menjadi peserta pelatihan, Jumlah peserta pada akhirnya akan disesuaikan dengan kondisi aktual sumber daya penelitian, terutama sumber daya finansial.

Tahap *keempat*, *Pilot project Model Peace-building Teaching and Learning*. *Pilot project* akan diselenggarakan di minimal 5 (lima) wilayah sesuai dengan *coverage* penelitian ini. *Pilot project* ini meliputi implementasi Model *Peace-building Teaching and Learning* pendekatan integratif dan belajar bersama.

Tahap *kelima*, penulisan artikel dan penerbitan buku. Tahap terakhir di tahun kedua penelitian ini adalah penulisan artikel untuk dikirimkan ke jurnal terakreditasi atau jurnal bereputasi internasional. Selain itu juga penerbitan buku yang dikembangkan dari modul belajar bersama, juga dari *pilot project* praktek pembelajaran integratif dan belajar

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan terdahulu, dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Anatomi kekerasan dalam pembelajaran dapat dibedah melalui beberapa aspek: Anatomi kekerasan dalam penelitian ini dikonstruksi dari beberapa aspek, yaitu: aktor, *locus*, motif, dan bentuk kekerasan. Aktor kekerasan dalam pembelajaran meliputi pemerintah, guru, dan siswa. Motif kekerasan yang terdapat di dalam pembelajaran antara lain: kelalaian, balas dendam, dan kultur massif sekolah. Bentuk-bentuk kekerasan di dalam praktek pembelajaran dapat dikategorikan ke dalam dua kategori, yaitu struktural dan kultural. Kekerasan dalam katagori struktural terjadi dari guru kepada siswa. Terdapat beberapa kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di dalam praktek pembelajaran di kelas, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan simbolik, Sedangkan kekerasan kultural berlangsung dalam kontinum horizontal, dari siswa yang satu kepada siswa lainnya, dalam bentuk: 1) Kekerasan terbuka: kekerasan fisik dan *bullying*. 2) Kekerasan tertutup: Bullying dan pelecehan seksual
2. Prinsip-prinsip pembelajaran demokratis dan damai dapat dikembangkan dengan mengadopsi tiga teori dan konsep, yaitu *non-violence*, toleransi, dan nondiskriminasi. Prinsip-prinsip tersebut antara

lain adalah: menghormati (*respect*), memahami (*understanding*), menerima (*acceptance*), menghargai perbedaan (*appreciating differences*), berhutang kepada orang lain (*owing the others*), dan berempati atau mendalami penderitaan orang lain (*absorbing suffer*).

3. Model *Peace-building Teaching and Learning* merupakan salah satu bentuk intervensi melalui pendidikan formal untuk mencegah maraknya tindakan kekerasan di tengah-tengah masyarakat. Elaborasi atas model ini dapat dielaborasi melalui dimensi-dimensi berikut: 1) Jenis pembelajaran: Pembelajaran integrative dan Belajar Bersama secara tematik, 2) Sasaran: jenjang pendidikan SMP, 3) Pendekatan pokok: Pembelajaran integratif, meliputi penerapan ucapan atau kata-kata non kekerasan, sikap-sikap non kekerasan, dan tindakan-tindakan non kekerasan. Belajar bersama, meliputi refleksi dan *brainstorming*, elaborasi dan eksplorasi, *problem solving*, serta refleksi. 4) Materi: Demokrasi, Deliberasi (Musyawarah), *Peaceful Co-existence*, Anti kekerasan (*Non-violence*), dan Membangun Komunitas Anti-kekerasan (*Non-violence Community Building*). 5) Fasilitator: Orang dewasa (guru/orang dewasa lain) dan/atau sebaya.

B. Saran

Berpijak pada kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan model ini kepada:

1. Pengembang kurikulum: hendaknya memastikan bahwa kurikulum bebas dari konten kekerasan, baik simbolik maupun struktural, kemudian juga memastikan bahwa implementasinya di lapangan sesuai dengan nilai-nilai ideal dan struktur konseptual yang diinginkan.
2. Para penulis: seyogyanya melakukan upaya optimal untuk menuangkan ideal-ideal dan struktur konseptual kurikulum ke dalam materi ajar standar yang bebas dari muatan-muatan kekerasan, seperti kekerasan simbolik dalam muatan cerita, narasi, dan penggunaan gambar.
3. Para peneliti lain, hendaknya melakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut untuk menyempurnakan penelitian yang masih memiliki kekurangan ini. Beberapa “ruang yang masih terbuka” untuk itu antara lain: pendalaman anatomi kekerasan sesuai dengan konteks kultural dan kekhasan lokal, pendekatan alternatif untuk mengatasi persoalan kekerasan di dalam masyarakat demokratis, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Assegaf, dkk. 2002. "Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan". *Laporan Penelitian Kompetitif*. Departemen Agama.
- Abdurrahman Assegaf. 2004. *Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi, Kondisi, Kasus dan Konsep*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Anon. 2013. "Principles of Nonviolence". Dapat diakses di laman http://compassionatecenter.org/Principles_of_Nonviolence.html, diakses pada tanggal 17 September 2013
- Arinto Nurcahyono. Tanpa tahun. *Kekerasan sebagai Fenomena Budaya: Suatu Pelacakan terhadap Akar Kekerasan di Indonesia*. Tanpa tempat dan penerbit.
- Burstyn, Joan N., et.al. 2001. *Preventing Violence in Schools*. Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers
- Ferraresi, Franco. 1996. *Threats to democracy*. Princeton: Princeton University Press
- Fisher, Simon, et.al. 2001. *Mengelola Konflik: keterampilan & Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council
- Francis Wahono. 2003. "Kekerasan dalam Pendidikan: Sebuah Tinjauan Sosio-Ekonomi Didaktika", dalam *Gelombang Perlawanan Rakyat: Kasus-Kasus Gerakan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press
- Franz Magnis Suseno. 2002. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia
- Galtung, Johan. 2003. *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*. Surabaya: Pustaka Eureka
- Garver, Newton. 1976. "What violence is?" dalam *Philosophy for a New Generation*. New York: A.K. Bierman and J. Gould
- Gould, James A., Iorio, John J. 1972. *Violence in Modern Literature*. San Fransisco: Boyd & Fraser Pub. Co.
- Harber Clive (ed). 2004. *Schooling as Violence: How Schools Harm Pupils and Societies*. Oxon: Routledge Falmer
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Nonviolence>, diakses pada tanggal 18 September 2013

<http://mlkday.gov/plan/library/background/principles.php>, diakses pada tanggal 18 September 2013

<http://www.cpt.org/files/PW%20-%20Principles%20-%20King.pdf>, diakses pada tanggal 18 September 2013

<http://www.psychologymania.com/2012/06/definisi-bullying.html>, diakses pada tanggal 18 September 2013

Jennings, Jeremy (ed). 2004. *Sorel: Reflection on Violence*. Cambridge: Cambridge University Press

Justin Sihombing. 2005. *Kekerasan terhadap Masyarakat Marjinal*: Yogyakarta: Penerbit Narasi 2005, hal. 8 – 9

Mochtar Lubis. 2001. *Manusia Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Rozi Syaifuan,dkk. 2006. *Kekuasaan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelajar

Suharno, “Konflik, Etnisitas, dan Integrasi Nasional” , Makalah disampaikan dalam *Seminar dan Lokakarya Resolusi Konflik pada Civics Community DIY*, tanggal 18 dan 20 November tahun 2006, di Universitas Negeri Yogyakarta

Turmudi. 2009. “Mengenal Kekerasan dalam Pendidikan dan Upaya Meniadakannya atau Memperkecil Resiko Tindak Kekerasan”. Disajikan dalam *Seminar Nasional di Universitas Tanjung Pura, dengan tema Kekerasan dalam Pendidikan*, 18 Mei 2009, Pontianak

LAMPIRAN 1. Instrumen Penelitian

PERTANYAAN KUNCI DALAM WAWANCARA MENDALAM:

1. Apakah anda menemukan praktek kekerasan di sekolah atau di kelas anda? Jelaskan!
2. Menurut pengamatan dan refleksi anda, apakah anda menemukan adanya kekerasan dalam pembelajaran?
3. Menurut pengamatan dan refleksi anda, apa saja contoh kekerasan yang anda temukan?
4. Jelaskan, berdasarkan pengamatan dan refleksi anda, gambaran kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa/murid?
5. Berikan gambaran kekerasan verbal (dalam bentuk kata-kata) yang dilakukan oleh guru terhadap murid?
6. Jika ada, berikan gambaran kekerasan fisik yang terjadi di dalam pembelajaran di sekolah anda!
7. Apakah anda menemukan kekerasan dalam buku teks pelajaran yang digunakan di sekolah anda? Jelaskan dan berikan gambaran lebih detail tentang hal ini!
8. Pernahkan anda menyaksikan kekerasan verbal dilakukan oleh siswa terhadap siswa yang lain?
9. Pernahkan anda menyaksikan kekerasan fisik yang dilakukan oleh siswa kepada siswa yang lain? Berikan penjelasan dan gambaran lebih detail mengenai kekerasan tersebut.
10. Apa saja resolusi yang sudah diterapkan oleh anda melalui pembelajaran untuk mengatasi atau mencegah terjadinya kekerasan di sekolah anda?
11. Jelaskan prinsip-prinsip anti kekerasan yang anda gunakan dalam pembelajaran anda?
12. Adakah langkah-langkah khusus yang anda lakukan dalam pembelajaran untuk membangun budaya toleransi dan antikekerasan?

LAMPIRAN 2. Biodata dan Kompetensi Tim Peneliti

Biodata Ketua Tim Peneliti:

A. Identitas Diri

1	Nama lengkap	Dr. Suharno, M.Si. L/P
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
3	Jabatan Struktural	----
4	NIP	19680417 200003 1 001
5	NIDN	0017046807
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Semarang, 17 April 1968
7	Alamat Rumah	Jl.Kaper Nitikan UH VI/337 Yogyakarta
8	Nomor Telepon	(0274) 8296337 / HP : 0813139494 Faks : -
9	Alamat Kantor	Karangmalang, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
10	Nomor Telepon	(0274) 548202/ Fax (0274) 548201
11	Alamat E-mail	Suharno1968@yahoo.com
12	Lulusan yang dihasilkan	S1 : 8 orang
13	Mata Kuliah yang diampu	1. Sosiologi Politik
		2. Konsep Dasar PKn
		3. Pendidikan Multikultur
		4. Sistem Politik Indonesia
		5. Pendidikan Kewarganegaraan

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	IKIP Yogyakarta	Universitas Gadjah Mada	Universitas Gadjah Mada
Bidang Ilmu	PMP dan KN	Ilmu Administrasi Negara	Ilmu Administrasi Negara
Tahun Masuk-Lulus	1988-1994	Lulus 2002	Lulus 2011
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Hubungan Sikap Mental dan Usaha Kepala Kelurahan Se-	Perencanaan Wilayah Kabupaten Bantul dalam Menyongsong	Politik Rekognisi dalam Peraturan Daerah tentang Penyelesaian

	Kotamadya Surakarta dengan Keberhasilan Meraih Adipura Kencana	Wacana Perkampungan Islam Internasional	Konflik di dalam Masyarakat Multikultural
Nama Pembimbing/Promotor	Ekrum Pw.,M.Pd & M. Subardi.,M.Pd	Prof. Dr. Agus Dwiyanto dan Ambar Teguh, M.Si.	Prof. Dr. Warsito Utomo, Dr. Samudra Wibawa

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber *	Jumlah (Juta Rp)
1	2006	Identitas Nasional dan Identitas Etnis Mahasiswa di Asrama-Asrama Berbasis Suku di DIY	DIPA	5
2	2006	Kualitas Pelayanan Publik Pasca Keputusan Men Pan No KEP/M.PAN/2/2004 di Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta	SP4	5
3	2006	Tracer Study Lulusan Jurusan PPKn Tahun 2001-2005 tgl. 14-26 Agustus 2006 di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Gunungkidul, Kulon Progo, Kota Yogyakarta Prop DIY dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen Prop. Jawa Tengah	SP4	5
4	2007	Peran Perempuan dalam Bidang Politik; Studi pada Zaman Khulafaur Rasyidin	DIPA	5
5	2009	Implementasi Konvensi Anti Diskriminasi Perempuan dalam Politik Hukum Indonesia	DIPA	7,5
6	2011	Sikap Mahasiswa FIS dalam Ujian Semester	DIPA	7,5

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul PPM	Pendanaan	
			Sumber *	Jumlah (Juta Rp)
1	2007	Pengembangan Aspek Moral dalam Mata Pelajaran PKN SD	Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	
2	2008	Sosialisasi dan Pelatihan untuk Sertifikasi Guru	STIE Nusa Bangsa Kebumen	
3	2009	Lomba Cerdas Cermat UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan RI Tingkat SLTA di Prop. DIY yang diselenggarakan oleh MPR RI	MPR RI	
4	2010	Pengembangan Mata Pelajaran IPS Terpadu	MGMP IPS Bantul	
5	2010	Lomba Cerdas Cermat UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan RI Tingkat SLTA di Prop. DIY yang diselenggarakan oleh MPR RI	MPR RI	
6	2011	Pengembangan Laboratorium IPS di Sekolah	FISE UNY	
7	2011	Lomba Cerdas Cermat UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan RI Tingkat SLTA di Prop. DIY yang diselenggarakan oleh MPR RI	MPR RI	

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Vol/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Konflik, Etnisitas, dan Integrasi Nasional	Desember 2006	CIVICS UNY
2	Identitas Nasional dan Identitas Etnis Mahasiswa di Asrama-Asrama Berbasis Suku di DIY	2007	HUMANIORA UNY
3	Telaah Kritis terhadap Masyarakat Madani (Civil Society)	Desember 2007	CIVICS UNY
4	Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik; Studi pada Zaman Khulafaur Rasyidin	April 2008	Humaniora UNY
5	Revitalisasi Birokrasi Menuju Good Governance	Desember 2008	CIVICS UNY

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Nasional Kebangsaan: Kerjasama FISE-Kedaulatan Rakyat	Membangun Kebangsaan Multikultural dari Bawah	FISE UNY, Oktober 2009
2	Simposium Nasional Ilmuwan Administrasi Negara	Kebijakan Berbasis Politik Rekognisi; Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional	26-27 Maret 2011
3	Kedaulatan Rakyat	Menyoal Kebijakan Ujian Nasional Pendidikan Agama	29 Maret 2011
4	Pelatihan bagi Perangkat Desa se Kabupaten Sleman	Mewujudkan Good Governance Kabupaten Sleman	Pemda Sleman, 14 November 2011
5	Pertemuan Guru di SMPN 2 Depok	Membangun Kepemimpinan yang Santun, Demokratis, Memahami Hak Kewajiban	SMPN 2 Depok, 15 Januari 2012
6	Pembekalan <i>on the job trining</i> bagi Kepala-Kepala Sekolah di Yogyakarta	Kepemimpinan Partisipatoris: untuk pembekalan <i>on the job trining</i> bagi Kepala-Kepala Sekolah di Yogyakarta	Majelis Pendidikan Dasar PWM Yogyakarta, 19 Febr 2012

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Hlmn	Penerbit
1	Dasar-Dasar Kebijakan Publik	2008	268	UNY Press

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HAKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
----	---	-------	------------------	-------------------

	diterapkan			

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2011	Piagam Penghargaan sebagai Juri Nasional LCC UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan RI	Ketua MPR RI: H. Taufik Kiemas
2010	Piagam Penghargaan sebagai Juri Nasional LCC UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan RI	Ketua MPR RI: H. Taufik Kiemas
2009	Piagam Penghargaan sebagai ketua KAPASGAMA oleh Ketua Umum KAGAMA	Ketua Kagama: Sri Sultan Hamengku Buwono X
2009	Piagam Penghargaan sebagai Juri Nasional LCC UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan RI	Ketua MPR RI: H. Taufik Kiemas

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam Laporan Penelitian Strategis Nasional 2013.

Yogyakarta, 20 November 2013
Pengusul,

(Dr. Suharno,M.Si)
NIP. 19680417 200003 1 001

Biodata Anggota Peneliti 1

A. IDENTITAS DIRI

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Samsuri, M.Ag.
2	Jabatan Fungsional	Lektor
3	NIP	197206192002121001
4	Tempat dan Tanggal Lahir	Haurgeulis, 19 Juni 1972
5	Alamat Rumah	Perum. Sambiroto Asri A-03, Purwomartani, Kalasan, Sleman 55571
6	Nomor Telepon/Faks.	-
7	Nomor HP	081805950338
8	Alamat Kantor	Jurusan PKn dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281
9	Nomor Telepon/Faks	0274-586168 ext. 595/0274-548201
10	Alamat e-mail	samsuri@uny.ac.id
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1= 5 orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pendidikan Kewarganegaraan
		2. Perbandingan Pendidikan Kewarganegaraan
		3. Dasar-dasar Pendidikan Moral
		4. Pendidikan Karakter
		5. Moral Agama

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

	S-1	S-2	S-3
Nama PT	IKIP Yogyakarta	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Universitas Pendidikan Indonesia Bandung
Bidang Ilmu	Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan	Studi Islam Konsentrasi Pendidikan Islam	Pendidikan IPS Konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan
Tahun Masuk-Lulus	1991-1997	1998-2000	2006-2010
Judul Tugas Akhir	Studi Penyelesaian Perang Sipil di Bosnia-Herzegovina (1992-1996)	Perjuangan Masyumi	Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society)

			Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Studi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi).
Nama Pembimbing/ Promotor	1.Drs. Ekram Pawiroputro, M.Pd. 2.Drs. Mudjono	Prof. Dr. Faisal Ismail, M.A.	1. Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H. 2. Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A. 3. Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si.

C. PENGALAMAN PENELITIAN

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2009	Transformasi Masyarakat Kewargaan (<i>Civil Society</i>) dalam Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Studi Politik Pendidikan dalam Pembentukan Masyarakat Demokratis)	Hibah Penelitian Mahasiswa Program Doktor SPs UPI Bandung	42,55
2.	2009	Pembaharuan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Politik Pendidikan di Indonesia Pasca-1998	DIPA FISE UNY	5
3.	2006	Penanaman Nilai Moral Model Manajemen Qolbu	DIPA FISE UNY	2,5

D. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2011	PENGEMBANGAN KEMAMPUAN	DIPA	5

		MENULIS ARTIKEL ILMIAH BERBASIS PENELITIAN DI JURNAL UNTUK GURU PKN SMP/MTs SE-KABUPATEN BANTUL	FISE UNY	
--	--	---	----------	--

E. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor	Nama Jurnal
1.	2010	Transforming Islamic Values Into Civic Education (A Preliminary Study in the Islamic Higher Education Institutions in Indonesia)	IX/2	MILLAH
2.	2009	Objektivikasi Pancasila sebagai Modal Sosial Warga Negara Demokratis dalam Pendidikan Kewarganegaraan	2/2	ACTA CIVICUS
3.	2007	<i>Civic Education</i> Berbasis Pendidikan Moral di Cina	1/1	ACTA CIVICUS
4.	2006	Kajian Tematis Keputusan-keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Perempuan	V/2	MILLAH

F. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	2010	Perbandingan Pendidikan Kewarganegaraan	199	FISE UNY
2.	2010	Panduan Pendidikan Karakter		FISE UNY
2.	2008	Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan		FISE UNY

G. PENGALAMAN PEROLEHAN HKI

No.	Tahun	Judul/Tema HKI	Jenis	Nomor P/ID
-	-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya

untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam Laporan Penelitian Strategis Nasional tahun 2013.

Yogyakarta, 20 November 2013
Pengusul,

Dr. Samsuri, M.Ag.
NIP. 19720619 200212 1 001

Biodata Anggota Tim Peneliti 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Grendi Hendrastomo, MM, MA L/P
2	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
3	Jabatan Struktural	Penata Muda Tk.1
4	NIP/NIK/No. Identitas lainnya	198201172006041002
5	NIDN	0017018201
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Yogyakarta, 17 Januari 1982
7	Alamat Rumah	Suryodiningratan MJ 2/672 Yogyakarta
8	Nomor Telepon/Faks/HP	0274-452274/08121556574
9	Alamat Kantor	Karangmalang, Depok, Sleman
10	Nomor Telepon/Faks	0274-586168 psw 385
11	Alamat e-mail	ghendrastomo@yahoo.com
12	Lulusan yang Telah dihasilkan	S1 = 10 orang
13	Mata Kuliah yang diampu	1. Sosiologi Budaya
		2. Sosiologi Hukum
		3. Sosiologi Konflik
		4. Studi Masyarakat Indonesia
		5. Pengembangan SDM

B. Riwayat Pendidikan

Program	S-1	S-2	S-2
Nama PT	Universitas Gadjah Mada	Universitas Gadjah Mada	Universitas Gadjah Mada
Bidang Ilmu	Sosiologi	Manajemen	Sosiologi
Tahun Masuk	2000-2004	2005-2007	2008-2011
Judul Skripsi/ Tesis/ Desertasi	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tepi Pantai	Analisis Perbedaan Kinerja Saham Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Setelah Initial Public Offering (IPO) Di Pasar Modal Indonesia	Representasi Citra Diri Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta
Nama Pembimbing	Dr. Partini, SU	Dr. Hardo Basuki	Drs, Andreas Soeroso, M.S

C. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2007	Pengembangan Model Delikan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Sejarah	DIPA UNY	8
2	2007	Studi Eksplorasi Pengembangan E-Learning dalam Proses Pembelajaran Sosiologi	DIPA FISE- UNY	3
3	2009	Representasi Telepon Seluler dalam Relasi Sosial: Studi Dampak Penggunaan Telepon Seluler dalam Komunikasi antara Dosen dan Mahasiswa	DIPA FISE- UNY	3
4	2010	Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui <i>Tracer Study</i> Di Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta	DIPA FISE- UNY	10
5	2011	Implementasi Sistem Pembelajaran Pindah Kelas (Moving Class) Pada Bidang Studi Sosiologi SMA di Kabupaten Bantul	DIPA FISE- UNY	7.5
6	2011	Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation untuk Meningkatkan Partisipasi Mahasiswa pada Perkuliahan Struktur dan Proses Sosial	DIPA FISE- UNY	7.5
7	2011	Implementasi Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta: Menggali Nilai-nilai Moderasi untuk Aksi Berbangsa dan Bernegara	DIPA FISE- UNY	7.5

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2007	Pelatihan PowerPoint sebagai Alternatif Media Pembelajaran dan Pengembangan Bahan Ajar untuk guru SMP rumpun ilmu sosial se Kab Bantul	DIPA UNY	5
2	2008	Pemberdayaan pemuda dalam Kegiatan Sosial Pengembangan Manajemen Organisasi Pemuda “Budidaya Sosial” Priyan, Potorono, Banguntapan, Bantul	DIPA FISE-UNY	2.5

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor	Nama Jurnal
1	2007	Nasionalisme vs Globalisasi, hilangnya semangat kebangsaan dalam peradaban modern	Volume 1 Nomor 1, Maret 2007	Dimensia
2	2008	Dilema dan Tantangan Pembelajaran E-Learning	Volume 4 Nomor 1, Mei 2008	Majalah Ilmiah Pembelajaran
3	2008	Penerapan Model Delikan sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS-Sejarah di SMP Muhammadiyah IV Yogyakarta	Volume 4 Nomor 2, Maret 2008	Istoria
4	2008	Representasi telepon seluler dalam Relasi Sosial	Volume 5 Nomor 2, September 2008	Socia
5	2009	Demokrasi dan Politik Pencitraan, Perang Iklan Politik Menuju Demokratisasi di Indonesia	Volume 3 Nomor 2, September 2009	Dimensia
6	2010	Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan	No. 2 XXXVI tahun 2010	Jurnal Informasi

		Korporasi		
7	2011	Keterpurukan Sektor Pertanian sebagai Potret Kegagalan Industrialisasi di Indonesia	Volume 5 No 1 Maret 2011	Jurnal Dimensia

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Kongres Pendidikan dan Kebudayaan	Homogenisasi Pendidikan: Potret Eksklusifitas Pendidikan Modern	UGM, 7-8 Mei 2012

G. Pengalaman Penulisan Buku

-

H. Pengalaman Perolehan HKI

-

I. Pengalaman Perumusan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya

-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam Laporan Penelitian Strategis Nasional 2013.

Yogyakarta, 20 November 2013
Pengusul,

Grendi Hendrastomo, MM, MA